



EFEKTIVITAS PERAN RW DALAM PENYALURAN ASPIRASI DAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SARAGI BUTON

Irman^{*1}, La Asiri², Nastia³

^{1,2,3} Univeristas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

*Corresponding Author: laasiriaris72@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received: 02 Februari 2026</p> <p>Revised: 04 Maret 2026</p> <p>Accepted: 02 April 2026</p> <p>Publication: 30 April 2026</p>	<p>Abstract: <i>Rukun Warga (RW) is a community institution that has a strategic role in channeling community aspirations and supporting development at the village level. However, the effectiveness of RW's position in local government practice still shows variation between regions. This study aims to analyze the effectiveness of RW's position in channeling community aspirations and supporting development in Saragi Village, Pasarwajo District, Buton Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, with informants consisting of village officials, RW administrators, and community leaders. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the effectiveness of RW is determined by the ability to capture and document community aspirations, coordination with the village government, and its impact on community participation in development activities. This study concludes that strengthening the institutional capacity and leadership of RW is a key factor in increasing the effectiveness of distributing aspirations and village development based on community participation.</i></p> <p>Abstrak: Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Namun, efektivitas kedudukan RW dalam praktik pemerintahan lokal masih menunjukkan variasi antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kedudukan RW dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari aparat kelurahan, pengurus RW, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas RW ditentukan oleh kemampuan menjaring dan mendokumentasikan aspirasi masyarakat, koordinasi dengan pemerintah kelurahan, serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan RW menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penyaluran aspirasi dan pembangunan kelurahan berbasis partisipasi masyarakat</p>
<p>Keywords: <i>Unity of the people, Effectiveness, Community Aspirations, Village Development.</i></p> <p>Kata Kunci: Rukun Warga, Efektivitas, Aspirasi Masyarakat, Pembangunan Kelurahan.</p>	
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan kelurahan di Indonesia. Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kelurahan, RW diharapkan mampu menyalurkan aspirasi warga sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kedudukan RW ini secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang menegaskan bahwa RW berfungsi membantu pemerintah kelurahan dalam bidang pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Pratama, 2022) (Wicaksono, 2022).

Dalam praktik pemerintahan lokal, efektivitas RW menjadi faktor penting bagi terwujudnya pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. RW tidak hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kebijakan, tetapi juga sebagai saluran representasi kepentingan warga. Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah (Sari & Nugroho, 2020) (Hidayat, 2023). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga kemasyarakatan seperti RW kerap menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sehingga fungsi penyaluran aspirasi masyarakat belum berjalan optimal (Nugraha, 2019) (Hasibuan, 2020).

Kondisi tersebut juga terlihat di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Kelurahan Saragi merupakan wilayah dengan dinamika sosial yang cukup tinggi, ditandai oleh pertumbuhan penduduk, heterogenitas mata pencaharian, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pembangunan lingkungan. Berdasarkan data kelurahan tahun 2024, wilayah ini memiliki tujuh RW dan dua puluh satu RT dengan jumlah penduduk sekitar 3.240 jiwa. Dalam konteks tersebut, keberadaan RW menjadi sangat penting sebagai mekanisme komunikasi publik antara masyarakat dan pemerintah kelurahan, khususnya dalam menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah (Utami, 2023).

Meskipun secara normatif RW memiliki kedudukan strategis, hasil observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa efektivitas RW di Kelurahan Saragi masih beragam. Sebagian RW mampu mengorganisir musyawarah warga dan menyalurkan aspirasi ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel), sementara RW lainnya cenderung pasif dan bergantung pada inisiatif individu ketua RW. Akibatnya, tidak semua aspirasi masyarakat terdokumentasi dan terakomodasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi warga serta kurang optimalnya respons kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Kurniawan, 2022) (Lestari, 2024).

Berbagai studi sebelumnya menegaskan bahwa efektivitas lembaga kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan, partisipasi masyarakat, serta dukungan kelembagaan dari pemerintah setempat (Dwiyanto, 2020); (Suharto, 2021) (Firmansyah, 2023). Namun, sebagian besar penelitian mengenai peran RW masih berfokus pada wilayah perkotaan besar, sementara kajian empiris mengenai efektivitas RW di daerah kepulauan seperti Kabupaten Buton masih relatif terbatas. Padahal, karakter sosial masyarakat kepulauan yang kental dengan nilai gotong royong dan ketergantungan pada tokoh lokal memberikan konteks yang berbeda dalam memahami dinamika kelembagaan RW (Yusuf, 2022).

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kajian mengenai efektivitas kedudukan RW di Kelurahan Saragi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan peran RW dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian pemerintahan lokal, khususnya terkait penguatan lembaga kemasyarakatan sebagai instrumen demokrasi partisipatif di tingkat kelurahan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kedudukan Rukun Warga (RW) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik sekaligus masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan RW agar mampu berfungsi secara lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis efektivitas kedudukan Rukun Warga (RW) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika peran RW dalam konteks sosial dan kelembagaan yang spesifik (Hidayat, 2022); (Prasetyo, 2021).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki struktur RW yang aktif dan beragam dalam praktik penyaluran aspirasi masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi aparat kelurahan, pengurus RW, dan tokoh masyarakat yang dianggap memahami secara langsung peran dan kinerja RW dalam proses pembangunan kelurahan (Sari, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyaluran aspirasi, koordinasi antara RW dan pemerintah kelurahan, serta tingkat partisipasi masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas RW dalam forum musyawarah warga dan kegiatan pembangunan kelurahan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa notulen musyawarah, program pembangunan, dan arsip kelurahan (Utami, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis, efektivitas kedudukan RW dianalisis berdasarkan indikator kemampuan menjaring aspirasi masyarakat, pendokumentasian dan penyampaian aspirasi, koordinasi dengan pemerintah kelurahan, serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik (Rahman, 2022); (Wicaksono, 2021).

RESULT AND DISCUSSION

Result

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas kedudukan Rukun Warga (RW) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten

Buton. Analisis dilakukan dengan menggunakan empat indikator efektivitas RW, yaitu kemampuan menjaring aspirasi masyarakat, kemampuan mendokumentasikan dan menyampaikan aspirasi, koordinasi dengan pemerintah kelurahan, serta dampaknya terhadap partisipasi dan kegiatan pembangunan.

Kemampuan RW dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan RW dalam menjaring aspirasi masyarakat di Kelurahan Saragi masih bervariasi antarwilayah RW. RW yang memiliki kepemimpinan aktif dan komunikasi intensif dengan warga cenderung lebih efektif dalam menghimpun aspirasi masyarakat. RW 01 dan RW 03, misalnya, secara rutin melaksanakan musyawarah warga dan memanfaatkan forum informal seperti pertemuan lingkungan serta grup komunikasi warga untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat (Hidayat, 2022) ; (Pratama, 2021).

Sebaliknya, pada RW 02, RW 04, dan RW 05, proses penjaringan aspirasi masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan. Aspirasi masyarakat umumnya disampaikan secara lisan kepada ketua RW tanpa mekanisme musyawarah yang terjadwal. Kondisi ini menyebabkan tidak semua kelompok warga terlibat dalam proses penyampaian aspirasi, terutama warga yang kurang aktif dalam kegiatan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas RW dalam menjaring aspirasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan dan tingkat partisipasi warga, sebagaimana ditegaskan oleh (Dwiyanto, 2020) bahwa lembaga lokal yang efektif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai sumber legitimasi (Sari & Nugroho, 2020); (Kurniawan, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas RW dalam menjaring aspirasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan dan tingkat partisipasi warga, sebagaimana ditegaskan oleh (Dwiyanto, 2020) bahwa lembaga lokal yang efektif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai sumber legitimasi. Selain itu, penelitian mutakhir juga menekankan bahwa keberhasilan lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun aspirasi ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan warga secara berkelanjutan (Utami, 2024).

Tabel 1: Kemampuan RW dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat di Kelurahan Saragi

No	RW	Mekanisme Penjaringan Aspirasi	Pola Pelaksanaan	Tingkat Partisipasi Warga	Temuan Utama	Kategori Efektivitas
1	RW 01	Musyawarah warga, pertemuan	Terjadwal dan rutin	Tinggi	Aspirasi dihimpun secara	Tinggi

		lingkungan, grup komunikasi (WhatsApp)			sistematis dan representatif	
2	RW 03	Musyawarah warga, forum informal, komunikasi aktif	Relatif terjadwal	Tinggi	Mampu mengidentifikasi kebutuhan warga secara kolektif	Tinggi
3	RW 02	Penyampaian langsung ke ketua RW (lisan)	Tidak terjadwal (sporadis)	Rendah	Aspirasi tidak terdata dengan baik	Rendah
4	RW 04	Penyampaian informal tanpa forum resmi	Sporadis	Rendah	Keterlibatan warga terbatas	Rendah
5	RW 05	Komunikasi personal tanpa musyawarah	Sporadis	Rendah	Aspirasi hanya dari warga tertentu (tidak merata)	Rendah

Sumber: *Data primer hasil wawancara mendalam dengan Ketua RW dan warga serta observasi lapangan di Kelurahan Saragi, 2025.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan RW dalam menjaring aspirasi masyarakat sangat ditentukan oleh keberadaan mekanisme yang terlembagakan serta tingkat partisipasi warga. RW yang memiliki forum musyawarah rutin dan komunikasi aktif cenderung lebih efektif dibandingkan RW yang masih mengandalkan pola komunikasi informal dan sporadis.

Kemampuan RW dalam Mendokumentasikan dan Menyampaikan Aspirasi

Dari aspek dokumentasi dan penyampaian aspirasi, penelitian menemukan bahwa sebagian besar RW di Kelurahan Saragi belum memiliki sistem administrasi yang tertata dengan baik. RW yang tergolong efektif umumnya mampu menyusun daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil musyawarah warga dan menyampaikannya secara formal kepada pemerintah kelurahan, terutama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) (Prasetyo, 2021); (Hidayat, 2023).

Namun demikian, pada RW yang kurang aktif, aspirasi masyarakat sering kali tidak terdokumentasi dalam bentuk tertulis, sehingga sulit untuk diperjuangkan dalam forum perencanaan pembangunan. Aspirasi hanya disampaikan secara lisan dan bergantung pada daya ingat serta inisiatif ketua RW. Akibatnya, banyak kebutuhan masyarakat yang tidak tercatat dalam dokumen perencanaan kelurahan dan tidak masuk dalam prioritas pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa dokumentasi aspirasi merupakan faktor kunci keberhasilan lembaga

kemasyarakatan dalam memengaruhi kebijakan pembangunan lokal (Kurniawan, 2022); (Sari, 2020).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa dokumentasi aspirasi merupakan faktor kunci keberhasilan lembaga kemasyarakatan dalam memengaruhi kebijakan pembangunan lokal, karena menjadi dasar legitimasi dalam proses pengambilan keputusan (Utami, 2024). Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa kemampuan organisasi lokal dalam mengelola informasi dan menyampaikan aspirasi secara sistematis sangat menentukan tingkat responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat (Wicaksono, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas RW tidak hanya ditentukan oleh kemauan untuk menyalurkan aspirasi, tetapi juga oleh kemampuan administratif dalam mengelola dan mengomunikasikan aspirasi secara sistematis kepada pemerintah kelurahan.

Tabel 2: Kemampuan RW dalam Mendokumentasikan dan Menyampaikan Aspirasi di Kelurahan Saragi

No	RW	Kemampuan Dokumentasi Aspirasi	Bentuk Penyampaian	Keterlibatan dalam Musrenbangkel	Temuan Utama	Kategori Efektivitas
1	RW 01	Terdokumentasi (daftar usulan tertulis)	Formal (disampaikan ke kelurahan)	Aktif	Aspirasi tersusun sistematis dan masuk dalam perencanaan	Tinggi
2	RW 03	Terdokumentasi (hasil musyawarah warga)	Formal dan terstruktur	Aktif	Mampu mengomunikasikan aspirasi secara jelas	Tinggi
3	RW 02	Tidak terdokumentasi dengan baik	Lisan	Kurang aktif	Aspirasi tidak tercatat dan sulit diperjuangkan	Rendah
4	RW 04	Minim dokumentasi	Lisan/informal	Kurang aktif	Banyak aspirasi tidak masuk dalam perencanaan	Rendah
5	RW 05	Tidak terdokumentasi	Lisan	Tidak aktif	Bergantung pada inisiatif ketua RW	Rendah

Sumber: Data primer hasil wawancara mendalam dengan Ketua RW dan warga serta observasi lapangan di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Tahun 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan dokumentasi dan penyampaian aspirasi menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan RW dalam memengaruhi kebijakan pembangunan. RW yang memiliki sistem administrasi yang baik cenderung lebih mampu mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam forum

perencanaan, sementara RW yang lemah dalam dokumentasi mengalami kesulitan dalam memperjuangkan kebutuhan warga secara formal.

Koordinasi dan Komunikasi RW dengan Pemerintah Kelurahan

Koordinasi antara RW dan pemerintah kelurahan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas kedudukan RW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan koordinasi di Kelurahan Saragi masih bersifat tidak merata. RW yang aktif cenderung memiliki hubungan komunikasi yang lebih intensif dengan pihak kelurahan, baik melalui pertemuan formal maupun komunikasi informal. RW jenis ini relatif lebih mudah mengakses informasi program pembangunan dan memperoleh respons terhadap aspirasi masyarakat (Hidayat, 2023); (Pratama, 2022).

Sebaliknya, RW yang kurang aktif menunjukkan hubungan koordinasi yang lemah dengan pemerintah kelurahan. Komunikasi sering kali bersifat satu arah dan insidental, terutama ketika ada kegiatan yang diinisiasi oleh kelurahan. Tidak adanya mekanisme koordinasi rutin menyebabkan RW sulit menyusun agenda kegiatan yang selaras dengan program pembangunan kelurahan. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut sebagai keterbatasan struktural lembaga kemasyarakatan yang menyebabkan peran representatif RW belum berjalan optimal. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif RW dan praktik empirik di lapangan. Regulasi telah menempatkan RW sebagai mitra strategis kelurahan, namun tanpa dukungan mekanisme koordinasi yang jelas, efektivitas kemitraan tersebut sulit diwujudkan (Rahman, 2021); (Kurniawan, 2023).

Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut sebagai keterbatasan struktural lembaga kemasyarakatan yang menyebabkan peran representatif RW belum berjalan optimal. Penelitian lain juga menegaskan bahwa tanpa dukungan kelembagaan yang jelas dan mekanisme komunikasi yang terstruktur, lembaga lokal cenderung mengalami disfungsi dalam menjalankan peran mediasi antara masyarakat dan pemerintah (Utami, 2024); (Wicaksono, 2022).

Tabel 3: Koordinasi dan Komunikasi RW dengan Pemerintah Kelurahan Saragi

No	R W	Intensitas Koordinasi	Pola Komunikasi	Akses Informasi Program	Sinkronisasi Kegiatan	Temuan Utama	Kategori Efektivitas
1	R W 01	Tinggi	Dua arah (formal & informal)	Mudah	Selaras	Komunikasi aktif, respons kelurahan cepat	Tinggi
2	R W	Tinggi	Dua arah	Mudah	Relatif selaras	Koordinasi rutin dan	Tinggi

	03					adaptif	
3	R W 02	Rendah	Satu arah (insidenta l)	Terbatas	Kurang selaras	Bergantung pada informasi dari kelurahan	Rendah
4	R W 04	Rendah	Satu arah	Terbatas	Tidak selaras	Minim intera ksi dengan kelurahan	Rendah
5	R W 05	Sangat rendah	Satu arah (sporadis)	Sangat terbatas	Tidak selaras	Koordinasi lem ah dan tidak terstruktur	Rendah

Sumber: *Data primer hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Tahun 2025.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi dan komunikasi antara RW dan pemerintah kelurahan sangat ditentukan oleh intensitas interaksi dan pola komunikasi yang dibangun. RW yang memiliki komunikasi dua arah dan terstruktur cenderung lebih mampu mengakses informasi serta menyelaraskan program kegiatan dengan kebijakan kelurahan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi menyebabkan keterbatasan akses informasi dan rendahnya integrasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Dampak Peran RW terhadap Partisipasi dan Kegiatan Pembangunan

Dari sisi dampak, penelitian ini menemukan bahwa RW yang efektif memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan. RW yang aktif mampu menggerakkan warga dalam kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan, serta pemeliharaan fasilitas umum. Warga pada RW ini menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dan memiliki persepsi positif terhadap peran RW sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah (Sari & Nugroho, 2020); (Hidayat, 2023).

Sebaliknya, pada RW yang kurang efektif, tingkat partisipasi warga cenderung rendah dan kegiatan pembangunan lebih banyak bergantung pada inisiatif pemerintah kelurahan. Partisipasi warga bersifat reaktif dan terbatas pada kegiatan tertentu, tanpa keterlibatan dalam tahap perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas RW berpengaruh langsung terhadap kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh bahwa partisipasi yang tidak difasilitasi secara institusional cenderung bersifat simbolik dan kurang berdampak (Kurniawan, 2022); (Pratama, 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas RW berpengaruh langsung terhadap kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh

penelitian bahwa partisipasi yang tidak difasilitasi secara institusional cenderung bersifat simbolik dan kurang berdampak terhadap hasil pembangunan. Selain itu, penelitian lain juga menekankan bahwa partisipasi yang berkualitas memerlukan dukungan struktur kelembagaan yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara berkelanjutan (Utami, 2024).

Tabel 4: Dampak Peran RW terhadap Partisipasi dan Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Saragi

No	RW	Tingkat Partisipasi Warga	Bentuk Keterlibatan	Jenis Kegiatan Pembangunan	Persepsi Warga terhadap RW	Temuan Utama	Kategori Dampak
1	RW 01	Tinggi	Aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan	Gotong royong, kebersihan, pemeliharaan fasilitas	Positif	Warga terlibat aktif dan memiliki rasa kepemilikan	Tinggi
2	RW 03	Tinggi	Aktif dan kolektif	Kegiatan lingkungan dan fasilitas umum	Positif	Partisipasi luas dan berkelanjutan	Tinggi
3	RW 02	Rendah	Terbatas pada pelaksanaan	Kegiatan insidental	Kurang positif	Partisipasi bersifat reaktif	Rendah
4	RW 04	Rendah	Minim keterlibatan	Bergantung pada program kelurahan	Netral	Warga kurang terlibat dalam pembangunan	Rendah
5	RW 05	Sangat rendah	Pasif	Hampir tidak ada kegiatan kolektif	Negatif	Tidak ada dorongan partisipasi dari RW	Rendah

Sumber: *Data primer hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Tahun 2025.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas peran RW memiliki dampak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan keberhasilan kegiatan pembangunan di tingkat lokal. RW yang mampu mengorganisir warga secara aktif tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Sebaliknya, RW yang kurang efektif cenderung menghasilkan partisipasi yang bersifat pasif dan terbatas, sehingga kegiatan pembangunan lebih bergantung pada inisiatif pemerintah kelurahan.

Diskusi: Efektivitas RW dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Lokal

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kedudukan RW di Kelurahan Saragi masih bersifat parsial dan belum merata. RW yang efektif umumnya ditopang oleh kepemimpinan yang partisipatif, kemampuan administratif dasar, serta komunikasi yang baik dengan pemerintah kelurahan. Sementara itu, RW

yang kurang efektif menghadapi hambatan berupa keterbatasan kapasitas pengurus, minimnya dukungan kelembagaan, dan rendahnya partisipasi warga (Hidayat, 2023); (Kurniawan, 2022). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas lembaga kemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh faktor sosial dan kelembagaan yang berkembang di tingkat lokal (Suharto, 2021). Dalam konteks Kelurahan Saragi, RW memiliki potensi besar sebagai instrumen demokrasi partisipatif, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan (Pratama, 2022); (Wicaksono, 2021).

Dalam konteks Kelurahan Saragi, RW memiliki potensi besar sebagai instrumen demokrasi partisipatif, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan sering kali belum mampu berperan optimal sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah akibat lemahnya penguatan kapasitas dan dukungan kebijakan (Utami, 2024); (Rahman, 2021). Oleh karena itu, penguatan efektivitas RW perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, pembenahan sistem administrasi dan dokumentasi aspirasi, serta penguatan mekanisme koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Dengan demikian, RW dapat berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan sosial, tetapi juga sebagai aktor penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kedudukan Rukun Warga (RW) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, masih bersifat beragam dan belum merata antarwilayah RW. Berdasarkan empat indikator efektivitas, yaitu kemampuan menjangkau aspirasi, mendokumentasikan dan menyampaikan aspirasi, koordinasi dengan pemerintah kelurahan, serta dampaknya terhadap partisipasi dan kegiatan pembangunan, hanya sebagian RW yang menunjukkan kinerja kelembagaan yang relatif efektif.

RW yang efektif umumnya ditandai oleh kepemimpinan yang aktif dan partisipatif, adanya forum musyawarah warga yang berjalan secara rutin, serta kemampuan dasar dalam mendokumentasikan dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara formal kepada pemerintah kelurahan, khususnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel). Sebaliknya, RW yang kurang

efektif cenderung mengalami keterbatasan kapasitas administratif, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas RW tidak hanya ditentukan oleh kerangka regulasi yang bersifat normatif, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan lokal, dukungan kelembagaan dari pemerintah kelurahan, dan tingkat keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran RW perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus, pembenahan sistem administrasi dan dokumentasi aspirasi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara RW dan pemerintah kelurahan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian pemerintahan lokal dengan menegaskan pentingnya lembaga kemasyarakatan sebagai instrumen demokrasi partisipatif di tingkat mikro. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan RW agar lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan kelurahan berbasis kebutuhan masyarakat.

REFERENCES

- Dwiyanto, A. (2020). *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK*. Gadjah Mada University Press.
- Firmansyah, D. (2023). PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 145–158.
- Hasibuan, M. (2020). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. Bumi Aksara.
- Hidayat, T. (2022). PENDEKATAN KUALITATIF DALAM STUDI PEMERINTAHAN LOKAL. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 8(1), 33–47.
- Hidayat, T. (2023). KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 67–80.
- Kurniawan, B. (2022). KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 10(2), 89–102.
- Kurniawan, B. (2023). KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 55–70.

- Lestari, S. (2024). DINAMIKA KELEMBAGAAN LOKAL DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(1), 33–47.
- Nugraha, A. (2019). *MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA*. Alfabeta.
- Prasetyo, A. (2021). METODE STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Penelitian Sosial*, 9(2), 120–134.
- Pratama, R. (2021). TATA KELOLA PEMERINTAHAN PARTISIPATIF DI TINGKAT LOKAL. *Jurnal Governance*, 13(1), 55–68.
- Pratama, R. (2022). INTERAKSI KELEMBAGAAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(2), 101–115.
- Rahman, F. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI TINGKAT LOKAL. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 5(2), 88–102.
- Rahman, F. (2022). KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 6(1), 75–88.
- Sari, M. (2020). TEKNIK PURPOSIVE SAMPLING DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Jurnal Metode Penelitian*, 7(1), 45–56.
- Sari, M., & Nugroho, Y. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS KOMUNITAS. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 200–212.
- Suharto, E. (2021). *MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKYAT: KAJIAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL*. Refika Aditama.
- Utami, N. (2023). KOMUNIKASI PUBLIK DAN EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN LOKAL. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 5(1), 44–59.
- Utami, N. (2024). PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMBANGUNAN LOKAL. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 6(1), 12–25.
- Wicaksono, A. (2021). SISTEM ADMINISTRASI DAN RESPONSIVITAS PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 77–90.
- Wicaksono, A. (2022). PERAN LEMBAGA LOKAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(1), 77–90.
- Yusuf, M. (2022). KARAKTERISTIK MASYARAKAT KEPULAUAN DALAM PEMBANGUNAN LOKAL. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(2), 150–163.